

SOSIALISASI DI BANYUSOCO

Masyarakat Jangan Terkecoh Cukai Palsu



KR-Endar Widodo

Tim Sosialisasi Cukai Rokok Kantor Bea Cukai DIY Bimo Adi Saputro interaktif dengan peserta.

WONOSARI (KR) - Kantor Bea Cukai DIY bersama Satpol PP Gunungkidul kembali melakukan sosialisasi cukai rokok di Rumah Makan (RM) Wilayah Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Playen, beberapa hari lalu. Hadir para pedagang, tokoh masyarakat, Dukuh Sawah Lor, Babinsa, Babinkamtibas dan sejumlah undangan lain. Sebagai nara sumber,

Bimo Adi Saputro SE Tim dari Bea Cukai DIY dan jajarannya, Plh Kabid Penegakan Perda Satpol PP Gunungkidul yang mewakili Kasat Pol PP Edy Basuki SIP MSi menambahkan, penjualan rokok ilegal dilakukan sembunyi-sembunyi, untuk memberantasnya harus mendapatkan dukungan masyarakat. Adapun ciri-ciri rokok ilegal, antara lain, tidak dilekati pita cukai pada kemasaannya (polos) atau ditempel pita cukai palsu. Biasanya design pita palsu warnanya memudar atau terlihat tidak jelas, seperti kertas print biasa. Bisa juga ditempel cukai yang pernah digunakan, terlihat sobek, berkerut dan tidak rapi dan ada juga cukai yang dikenakan tidak sesuai dengan pabrik yang memproduksi. (Ewi)

AWAL TAHUN 2025

143 Warga Terserang Penyakit DBD

WONOSATI (KR) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul Ismono meminta masyarakat mewaspadai penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Selama awal tahun 2025 dinkes mencatat sudah ada sebanyak 143 kasus DBD. Imbauan ini dilakukan karena dengan tingginya curah hujan, potensi penyebaran penyakit DBD semakin tinggi karena banyak genangan-genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembangbiak nyamuk Aedes Aegypti.

"Agar masyarakat tidak terserang DBD maka harus mewaspadai penyebaran penyakit ini dan agar melakukan berbagai upaya pencegahan," katanya.

Dari catatan yang maduk hingga bulan Februari ini sudah terdapat sebanyak 143 kasus DBD dengan rincian pada bulan Januari terdapat 136 kasus dan Februari 2025 ada 7 kasus. Untuk temuan kasus pada bulan Januari merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2024 yang

saat itu dalam sebulan ada temuan sebanyak 88 kasus DBD.

Masih di tahu 2024, pada bulan September tercatat 68 kasus; Oktober 54 kasus; November 62 kasus dan Desember ada 11 kasus. "Untuk bulan Januari 2025 termasuk tinggi dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya," ujarnya.

Meskipun sebaran kasus masih relatif tinggi, tetapi pihaknya memastikan tahun ini belum ada korban jiwa karena penyakit DBD.

Sementara untuk tahun 2024 lalu tercatat ada 1.844 kasus dan dari jumlah tersebut ada 5 orang meninggal dunia dan kesemuanya merupakan usia anak-anak dan balita. Untuk upaya pencegahan pihaknya kini, terus melakukan sosialisasi terhadapantisipasi penyakit DBD. Salah satunya melalui Gerakan Kesehatan Masyarakat (Germas) dengan melibatkan kader-kader Kesehatan di Tingkat kalurahan. (Bmp)

BAHRON KETUA BAMUSKAL

Pengawasan Kinerja Pemesan Meningkat

WONOSARI (KR) - H Bahron Rasyid SpD MM terpilih menjadi Ketua Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) se Gunungkidul di salah satu rumah makan di Wonosari, Kamis (27/2). Sedangkan sekretaris dijabat Suharjono SS dan Bendahara Prapto Sedyono MM.

"Bamuskal ini merupakan bagian dari pemerintahan kalurahan. Sehingga tentu melalui peran pengawasan, harapannya kinerja pemerintah kalurahan semakin meningkat dan menjadi lebih baik. Terutama dalam berbagai program dan pelayanan terhadap masyarakat," kata Ketua Forum Bamuskal se Gunungkidul H Bahron Rasyid MM.

Pembentukan forum ini sebelumnya juga sudah dilakukan melalui bamuskal



KR-Dedy EW

H Bahron Rasyid bersama pengurus dan undangan.

ditingkat kalurahan, kapanewon hingga akhirnya di Tingkat kabupaten. Diungkapkan, forum ini juga menjadi ajang silaturahmi antar anggota bamuskal se Gunungkidul. Untuk saling bertukar pikiran, sehingga nantinya penyelenggaraan pemerintah kalurahan menjadi lebih baik. "Termasuk nantinya diharapkan peran bamuskal di masing masing ka-

lurahan juga meningkat," jelasnya.

Sekretaris Bamuskal Gunungkidul Suharjono, forum ini sebagai ajang komunikasi. Agar nantinya Bamuskal bisa lebih dekat dengan pemangku kebijakan, baik itu bupati, dprd dan pihak terkait. Sehingga bagaimana untuk bisa meningkatkan fungsi pengawasan di Tingkat kalurahan. (Ded)

SASARAN PADI 8 RIBU HEKTARE

MT II Didominasi Tanaman Kacang Tanah



KR-Endar Widodo

Petani melakukan penanaman padi musim tanam (MT) II di Kapanewon Semin.

WONOSARI (KR) - Meskipun belum seluruh tanaman musim tanam I dipanen, tetapi sebagian petani sudah mulai melakukan penanaman musim tanam (MT) II. Mereka yang sudah mulai menanam padi, rata-rata yang pada musim tanam I melakukan tanam mendahului atau ngawu-awu. Musim tanam II ini didominasi ta-

naman kacang. Proyeksi Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul memproyeksikan tanam kacang tanah sekitar 32.000 hektare. "Bulan Februari ini lahan yang sudah ditanami kacang seluas 20.872 hektare luas tanam," kata Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul Ir Rahrjo Yuwono MSi, Rabu

(26/2).

Untuk sasaran tanam padi MT II sekitar 8.383 hektare yang rata-rata di wilayah tengah dan utara, terutama yang penyimpanan airnya masih bagus. Setelah memasuki bulan Maret, curah hujan cenderung menurun, sehingga hanya wilayah yang dekat dengan sumber air yang menanam padi. Sebagian wilayah Gunungkidul selatan, seperti Kapanewon Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjung Sari, Paliyan, Saptosari, Panggang dan Purwosari banyak yang menanam kacang dan polijo yang lain. Areal tanam jagung pada musim tanam II sarannya 7.176 hektare, sebagian sudah mulai tanam bulan Januari seluas 200 hektare dan Februari 4.121 hektare. (Ewi)

PROGRAM MBG SELAMA RAMADAN

Pelaksanaan Masih Dikaji

WONOSARI (KR) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul terus dievaluasi. Bahkan memasuki bulan Ramadan ini tengah dilakukan pengkajian untuk pelaksanaan program MBG tersebut.

Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Inf Roni Hermawan mengatakan, belum bisa menjelaskan terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis pada saat bulan Ramadan. Karena ada penerima yang menjalankan ibadah puasa dan ada yang tidak. Saat ini Kepala Dapur Sehat di kompleks Kodim 0730 baru melakukan koordinasi dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk

mekanisme penyaluran. "Untuk bulan Ramadan dan masih dilakukan pengkajian," katanya.

Dikatakan selama masih dalam koordinasi, pihaknya belum bisa memastikan terkait dengan kebijakan penyaluran saat Bulan Ramadan karena masih dibahas. Ditambahkan dalam upaya evaluasi pelaksanaan program MBG secara umum, program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar, namun ada

beberapa catatan untuk perbaikan. Sebagai contoh beberapa kali ada temuan nasi yang disajikan terlalu lembek karena saat dimasak terlalu banyak air. Di sisi lain, ada buah pepaya yang disajikan belum terlalu matang. "Saat ini terus kami evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik dengan kualitas menu yang tetap terjaga," ujarnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat, maka Pemkab diwajibkan mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 19,5 miliar. Hal ini

mengacu pada kemampuan keuangan yang dimiliki Pemkab sehingga setiap wilayah memiliki pagu berbeda-beda. Meskipun demikian, hingga sekarang belum bisa menyediakan secara penuh. Pasalnya, alokasi anggaran yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 baru sebesar Rp 12,2 miliar.

Rencananya kekurangan pagu ini akan dipenuhi pada saat pembahasan APBD Perubahan 2025. "Kekurangan dipenuhi melalui kajian tentang pendapatan hingga keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Tahun Anggaran 2024," ujarnya. (Bmp)

HINDARI TERJADI HARGA "NUTHUK"

Parkir dan Restoran Diminta Pasang Harga Resmi

WONOSARI (KR) - Untuk menjamin pelayanan wisatawan saat libur lebaran, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan surat edaran, tentang penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat menyambut bulan Ramadan. Edaran tertanggal 26 Februari ini dalam rangka mewujudkan Sapta Pesona Pariwisata.

Salah satunya meminta agar restoran, rumah makan, hotel untuk memasang tarif harga agar wisatawan mengetahui sebelumnya jasa pe-



KR-Endar Widodo

Oneng Windu Wardana SSi MSi

layanan. "Juru parkir harus memakai karcis parkir resmi agar pengguna jasa par-

kir memayar sesuai tarif yang dikeluarkan Dinas Perhubungan," demikian dalam SE Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Oneng Windu Wardana SSi MSi, Kamis (27/2).

Surat edaran meminta pemangku kepentingan, stakeholder dan pemtehlx untuk menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan keamanan. Memasang daftar harga produk layanan warung makan, restoran, kios souvenir, pusat oleh-oleh, sewa kamar bagi pemilik hotel, penginapan, juru parkir menggunakan

karcis sesuai dengan peraturan, pengelola parkir pribadi memungut harga wajar, mendorong para wisatawan melakukan transaksi non tunai.

Untuk menghindari kecelakaan laut semua pihak untuk dapat mendorong wisatawan untuk mematuhi instruksi petugas dalam kegiatan mandi dan berenang di laut, embung, telaga sungai dan kolam renang.

"Memastikan ada ijin keramaian jika menyelenggarakan atraksi di destinasi wisata," tambahnya. (Ewi)

RAKOR PENANGGULANGAN STUNTING

Pastikan Bumil Mendapatkan Gizi Cukup

WONOSARI (KR) - Wakil Bupati (Wabup) Gunungkidul Joko Parwoto MM memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Hotel Cyka Raya Wonosari, Rabu (26/2). Langkah ini dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi stunting di Gunungkidul.

"Stunting masih menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani. Karena merupakan kondisi gangguan gizi kronis yang dialami anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun atau yang dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," kata Wabup Joko Parwoto.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKPP-KB) Gunungkidul Drs Sujarwo, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Kepala Dinas Kesehatan Ismono MKes dan pihak terkait. Diungkapkan, penanganan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan,

dengan memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup serta pelayanan kesehatan yang optimal.

"Ibu hamil (bumil) harus dipastikan memperoleh asupan gizi yang cukup, terhindar dari risiko dan penyakit penyerta. Sehingga janin yang dikandung dapat tumbuh sehat," ujarnya.

Kepala DPMKPPKB Gunungkidul Drs Sujarwo menuturkan, angka stun-

ting di Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir mengalami pasang surut. Data tahun 2023, angka stunting di Gunungkidul tercatat mencapai 22,2 persen. Adapun data terbaru tahun 2024 masih dalam proses survei dan akan segera dikordinasikan dengan Dinas Kesehatan. "Penting melakukan validitas data dalam penanganan stunting," jelasnya. (Ded)



KR-Istimewa

Peserta rakor penanggulangan stunting.

CABAI RAWIT MERAH NAIK 2,86 PERSEN

Menjelang Puasa Harga 'Bapak' Stabil

WONOSARI (KR) - Harga kebutuhan bahan pokok (Bapak) menjelang bulan Ramadan relatif stabil. Hanya harga cabe rawit merah dua hari lalu mengalami kenaikan sedikit dari Rp 70 ribu menjadi Rp 72 ribu atau naik 2,86 persen.

Kebutuhan pokok yang lain sejak awal bulan

sampai akhir bulan banyak yang tidak naik. Stabilitas harga ini didukung suplai barang dan stok di pasar-pasar cukup melimpah. Mudah-mudahan harga kebutuhan pokok ini terus terjaga hingga lebaran dan seterusnya.

"Dukungan masyarakat belanja secara wajar agar

ikut serta menjaga stabilitas harga," kata Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Kelik Yudiantoro SSos MM, Kamis (27/2).

Bahkan dalam tiga hari terakhir harga cabe rawit hijau mengalami penurunan dari Rp 40 ribu menjadi Rp 35 ribu atau turun 12,50 persen. Dari

data Rabu (27/2) harga beras Ir 1 dan 2 Rp 16 ribu dan Rp 14 ribu, Gula pasir Rp 17 ribu, minyak goreng antara Rp 20 ribu dan Rp 21 ribu tergantung merk, terigu Rp 9,5 ribu sampai Rp 13 ribu, daging ayam sapi Rp 135 ribu, daging ayam broiler Rp 36 ribu, ayam kampung Rp 100 ribu, telur broiler Rp 30 ribu, cabe merah keriting Rp 30 ribu, biasa Rp 45 ribu, cabe rawit hijau Rp 35 ribu, merah Rp 72 ribu, bawang merah Rp 35 ribu, bawang putih Rp 44 ribu.

Selain melakukan monitoring harga Dinas Perdagangan juga melakukan pengecekan tanggal kedaluwarsanya barang. Para pedagang juga sudah diminta untuk terus melakukan pengecekan agar dagangan layak jual. "Terpenting masyarakat juga harus melihat tanggal kedaluwarsa setiap membeli barang," tambahnya. (Ewi)



KR-Endar Widodo

Petugas Dinas Perdagangan melakukan monitoring harga dan barang di Pasar Argosari, Wonosari.